

Literasi Politik di Era Demokrasi Digital: Analisis Kewaspadaan Pemilih terhadap Hoaks Pemilu di Kota Pariaman

Reno Fernandes^{1*}, Amin Akbar²

¹Universitas Negeri Padang, ²Universiti Pendidikan Sultan idris

*Corresponding author, e-mail: renofernandes@fis.unp.ac.id

Abstrak

Dalam era demokrasi digital, hoaks pemilu menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi, terutama di kalangan pemilih digital native. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kewaspadaan pemilih digital native di Kota Pariaman terhadap hoaks pemilu serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan pendekatan kuantitatif berbasis survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewaspadaan pemilih masih rendah, dengan hanya 15% responden yang secara aktif memverifikasi informasi, sementara mayoritas (60%) jarang atau tidak pernah mengecek kebenaran berita yang mereka terima. Selain itu, sebagian besar pemilih digital native lebih mengandalkan sumber yang kurang kredibel, seperti grup percakapan WhatsApp dan media sosial, dalam mencari informasi politik. Temuan ini menegaskan bahwa literasi politik tidak hanya mencakup pemahaman tentang sistem politik dan hak suara, tetapi juga keterampilan dalam memilah informasi di ekosistem digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan strategi literasi digital yang lebih komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil guna meningkatkan kesadaran kritis pemilih digital native dalam mengidentifikasi informasi yang valid dan mencegah penyebaran disinformasi politik.

Kata Kunci: Disinformasi; Demokrasi Digital; Hoaks Pemilu; Literasi Politik.

Abstract

In the era of digital democracy, election hoaxes pose a serious threat to the quality of democracy, especially among digital native voters. This study aims to measure the level of vigilance of digital native voters in Pariaman City towards election hoaxes and analyze the factors that influence it, using a survey-based quantitative approach. The results show that voter vigilance is still low, with only 15% of respondents actively verifying information, while the majority (60%) rarely or never check the veracity of the news they receive. In addition, most digital native voters rely more on less credible sources, such as WhatsApp conversation groups and social media, to find political information. These findings confirm that political literacy includes not only an understanding of the political system and voting rights, but also skills in sorting out information in an increasingly complex digital ecosystem. Therefore, a more comprehensive digital literacy strategy is needed through collaboration between the government, academics and civil society organizations to increase the critical awareness of digital native voters in identifying valid information and preventing the spread of political disinformation.

Keywords: Disinformaton; Digital democracy; Election hoaxes; Political literacy.

How to Cite: Fernandes, R. & Akbar, A. (2025). Literasi Politik di Era Demokrasi Digital: Analisis Kewaspadaan Pemilih terhadap Hoaks Pemilu di Kota Pariaman. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1(3), 171-188.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Era digital telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi informasi politik masyarakat. Kemudahan akses terhadap informasi melalui media sosial memberikan peluang bagi pemilih untuk memperoleh informasi politik secara cepat dan luas, sekaligus dengan mudah memberikan akses terhadap keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan partisipasi politik (Mascitti, 2024). Di sisi lain, maraknya hoaks dan disinformasi dalam pemilu menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi (Tandoc Jr et al., 2020). Hoaks pemilu dapat mempengaruhi persepsi, preferensi, dan keputusan pemilih, terutama bagi kelompok digital native yang menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi politik (Guess et al., 2020).

Fenomena ini semakin diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung memperkuat efek echo chamber dan filter bubble, di mana pengguna lebih sering terpapar informasi yang sesuai dengan preferensi mereka dan jarang mendapat sudut pandang yang berbeda (Iosifidis & Nicoli, 2020). Dalam konteks pemilu, kondisi ini dapat meningkatkan polarisasi politik serta memperkuat bias informasi yang tidak selalu berbasis fakta (Badrun, 2018). Rendahnya literasi digital dan politik di kalangan pemilih semakin memperburuk situasi, karena banyak individu yang tidak memiliki keterampilan untuk mengevaluasi kredibilitas sumber informasi (Fernandes et al., 2022).

Dalam perkembangan terakhir Indonesia, penyebaran informasi politik yang menyesatkan sering kali meningkat secara signifikan menjelang pemilu, menciptakan tantangan besar bagi ekosistem demokrasi yang sehat. Studi yang dilakukan oleh Iskandar (Iskandar & Faozi, 2025) menunjukkan bahwa platform digital seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter (X) menjadi saluran utama penyebaran hoaks politik. Pola distribusi informasi di media sosial yang bersifat cepat dan luas membuat misinformasi lebih mudah menyebar dibandingkan dengan klarifikasi yang valid. Selain itu, algoritma media sosial yang dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pengguna sering kali memperkuat echo chamber, di mana individu cenderung menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka tanpa verifikasi yang memadai (Weiss & Zoorob, 2021).

Fenomena ini semakin kompleks ketika pemilih tidak memiliki literasi politik yang cukup untuk membedakan antara informasi yang valid dan hoaks. Literasi politik, yang mencakup pemahaman terhadap proses politik, kemampuan berpikir kritis, serta

keterampilan verifikasi informasi, menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap hoaks pemilu (Kozyreva et al., 2020). Kurangnya literasi politik dapat membuat pemilih lebih rentan terhadap manipulasi informasi yang dapat memengaruhi preferensi dan keputusan politik mereka (Fyfe, 2007). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih masif dan sistematis, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun program sosialisasi berbasis komunitas, guna meningkatkan daya kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang semakin kompleks di era digital.

Penelitian mengenai hoaks dalam pemilu telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya. Sebagian besar kajian masih berfokus pada persebaran hoaks dalam skala nasional atau terbatas pada platform media sosial tertentu (Lim, 2023; Tapsell, 2021). Beberapa penelitian menyoroti bagaimana hoaks politik mempengaruhi perilaku pemilih dan kepercayaan terhadap sistem (Imawan, 2023; Kurniawan et al., 2024; Nwagwu et al., 2022; Surjatmodjo et al., 2024). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa hoaks lebih cepat menyebar dibandingkan dengan berita faktual, terutama di lingkungan digital yang minim verifikasi (Aïmeur et al., 2023). Namun, kajian yang secara spesifik mengukur kewaspadaan pemilih digital native terhadap hoaks pemilu di tingkat lokal masih sangat terbatas.

Kota Pariaman memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, mencapai 69,3%, menjadikannya kota dengan partisipasi tertinggi kedua di Sumatera Barat setelah Kota Sawahlunto. Tingginya angka partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik masyarakat yang relatif baik, tetapi belum tentu diiringi dengan tingkat literasi politik yang memadai. Pemilih digital native, yang mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, rentan terhadap misinformasi dan hoaks, terutama di tengah algoritma media sosial yang memperkuat efek echo chamber dan filter bubble, di mana individu lebih cenderung terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka tanpa proses verifikasi yang kritis (Erickson, 2024; Interian et al., 2023). Studi menunjukkan bahwa eksposur terhadap misinformasi politik dapat membentuk opini yang keliru dan sulit dikoreksi, bahkan setelah diberikan klarifikasi (Lewandowsky & van der Linden, 2021; Pantazi et al., 2021). Oleh karena itu, meneliti bagaimana pemilih di Kota Pariaman memilah informasi politik menjadi penting untuk memahami tantangan serta strategi dalam membangun ketahanan terhadap hoaks pemilu.

Selain itu, Kota Pariaman memiliki jaringan sosial yang kuat dalam komunitasnya, yang dapat mempercepat penyebaran informasi politik, baik yang valid maupun yang menyesatkan. Sebagai kota dengan infrastruktur digital yang berkembang, peningkatan

penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, juga menjadi faktor krusial dalam pola konsumsi informasi politik. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun digital native memiliki akses luas terhadap informasi, mereka tidak selalu memiliki keterampilan literasi digital yang cukup untuk mengevaluasi kredibilitas sumber (Bouaamri et al., 2024; Koskelainen et al., 2023; Oh et al., 2021; Yang et al., 2021) Rendahnya literasi politik dapat membuat mereka lebih rentan terhadap propaganda politik berbasis hoaks, yang dapat mempengaruhi preferensi pemilih dan melemahkan kualitas demokrasi (Bringula et al., 2022; Karolčík et al., 2025).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengarahkan fokusnya pada Kota Pariaman, yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Konteks ini menarik karena tingginya partisipasi pemilih dapat menjadi indikasi kesadaran politik yang lebih besar, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menyaring informasi politik yang akurat. Di Kota Pariaman, pemilih digital native, yang terdiri dari pemilih pemula (17–20 tahun), Generasi Z (21–25 tahun), dan Generasi Milenial (26–40 tahun), mencakup 54,1% dari total pemilih (KPU, 2024). Secara teoritis, kelompok digital native memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap internet dan teknologi informasi serta terbiasa berinteraksi dengan berbagai sumber informasi digital dalam kesehariannya (Ben Youssef et al., 2022; Wong et al., 2022) Namun, kemudahan akses ini tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan dalam menyaring dan memverifikasi informasi yang diterima, terutama dalam konteks politik dan pemilu. Tantangan utama bagi pemilih digital native adalah membedakan antara informasi faktual dan hoaks, yang sering kali dikemas dengan narasi persuasif dan tersebar luas di media sosial (Benaissa Pedriza, 2021).

Berdasarkan data di atas, penelitian ini lebih lanjut mengembangkan perspektif baru dengan mengeksplorasi hubungan antara literasi politik dan kecenderungan pemilih dalam melakukan verifikasi informasi yang mereka terima di media sosial. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kewaspadaan pemilih digital native terhadap hoaks pemilu. Faktor-faktor ini mencakup tingkat literasi politik, pola konsumsi informasi, serta mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh individu dalam menilai kredibilitas suatu berita.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika penyebaran informasi politik di tingkat lokal serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu, akademisi,

dan pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan edukasi pemilih yang lebih relevan bagi generasi digital native. Dengan meningkatnya literasi politik dan kewaspadaan terhadap disinformasi, diharapkan pemilih digital native dapat menjadi aktor yang lebih kritis dan tangguh dalam menghadapi lanskap informasi politik yang semakin kompleks di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengukur tingkat kewaspadaan pemilih digital native terhadap hoaks pemilu di Kota Pariaman. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang disebarakan kepada responden yang dipilih secara acak. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi hubungan antara literasi politik, pola konsumsi informasi, serta kecenderungan pemilih dalam melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilih di Kota Pariaman yang berjumlah 72.660 orang berdasarkan data dari KPU (2024). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling untuk memastikan keterwakilan proporsional dari masing-masing kategori usia. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 4,9%, jumlah sampel yang diambil adalah 400 responden.

Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik untuk menguji hubungan antara variabel penelitian. Analisis akan mencakup uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta teknik statistik seperti uji regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kewaspadaan pemilih digital native terhadap hoaks pemilu. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana pemilih digital native di Kota Pariaman menyikapi fenomena disinformasi politik serta memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih muda..

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kewaspadaan Pemilih Digital Native terhadap Hoaks Pemilu

Di era digital, arus informasi yang cepat dan luas membawa konsekuensi besar bagi proses demokrasi, terutama dalam konteks pemilu. Pemilih digital native, yang terdiri dari generasi yang tumbuh dengan teknologi digital, memiliki akses yang luas

terhadap informasi politik dari berbagai platform media sosial, situs berita daring, dan aplikasi perpesanan instan (Kim & Yang, 2016). Namun, kemudahan akses ini juga diiringi dengan tantangan berupa maraknya hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi serta keputusan politik pemilih (Rubio & Monteiro, 2023). Dalam konteks pemilu, hoaks sering digunakan sebagai alat propaganda politik untuk memengaruhi opini publik, menciptakan polarisasi, atau bahkan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Au et al., 2022).

Pemilih digital native diharapkan memiliki tingkat literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga lebih mampu menyaring informasi dan membedakan fakta dari misinformasi (Guess & Munger, 2023). Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki keterampilan dalam mengakses informasi secara daring, tidak semua memiliki kemampuan kritis yang cukup untuk menilai kredibilitas sumber berita (Swart, 2023). Fenomena ini menjadi perhatian utama dalam studi literasi politik di era digital, di mana kemampuan verifikasi informasi menjadi aspek krusial dalam membangun kesadaran politik yang sehat (Abdullah et al., 2021).

Dalam konteks Kota Pariaman, pemilih digital native memiliki proporsi yang cukup besar dalam daftar pemilih tetap, mencapai 54,1% dari total pemilih (KPU, 2024). Dengan dominasi kelompok usia ini, pemahaman terhadap pola konsumsi informasi serta kewaspadaan mereka terhadap hoaks pemilu menjadi hal yang penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur sejauh mana pemilih digital native di Kota Pariaman secara aktif memverifikasi informasi yang mereka peroleh terkait pemilu.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kewaspadaan pemilih digital native terhadap hoaks pemilu masih tergolong rendah. Banyak di antara mereka yang tidak secara aktif melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diterima, baik melalui pencarian di mesin pencari, sumber berita resmi, maupun sumber informasi lain yang kredibel. Pembahasan lebih lanjut mengenai pola dan kecenderungan verifikasi informasi oleh pemilih digital native di Kota Pariaman disajikan dalam bagian berikut.

Tabel 1. Frekuensi Pengecekan Kebenaran Informasi oleh Pemilih Digital Native

| Frekuensi Mengecek Kebenaran Informasi | Persentase (%) |
|--|----------------|
| Sering | 15% |
| Jarang | 38% |

| | |
|----------------|-----|
| Tidak Pernah | 22% |
| Tidak Tahu | 10% |
| Tidak Menjawab | 2% |

Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilih digital native di Kota Pariaman (60%) belum memiliki kebiasaan memverifikasi informasi yang mereka terima. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan politik berkontribusi terhadap rendahnya kewaspadaan terhadap hoaks pemilu (Bulya & Izzati, 2024; Isnaini et al., 2025). Kurangnya keterampilan dalam menilai kredibilitas informasi membuat pemilih lebih rentan terhadap manipulasi informasi, terutama dalam konteks pemilu, di mana propaganda politik sering kali dikemas dalam bentuk misinformasi yang menarik dan mudah tersebar (Pareek & Goncalves, 2024).

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun pemilih digital native memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi, mereka cenderung bergantung pada media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai sumber utama informasi politik (Newton, 2021). Hal ini berisiko tinggi karena media sosial sering menjadi sarana utama penyebaran hoaks, terutama yang berkaitan dengan politik dan pemilu (Khalyubi & Perdana, 2021). Temuan ini juga mengindikasikan bahwa pola konsumsi informasi yang tidak selektif dapat memperbesar kemungkinan pemilih digital native menerima dan mempercayai informasi yang belum diverifikasi.

Ketidakbiasaan dalam memverifikasi informasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan pengetahuan mengenai metode pengecekan fakta, rendahnya kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi, serta kecenderungan untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan preferensi politik mereka (Foyet & Child, 2024). Studi lain menunjukkan bahwa individu lebih cenderung mempercayai informasi yang mendukung pandangan mereka sebelumnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *confirmation bias* (Caffrey et al., 2023). Dengan demikian, rendahnya tingkat verifikasi informasi dalam kelompok pemilih digital native bukan hanya sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial.

Sumber Verifikasi Informasi Pemilih Digital Native

Selain mengukur frekuensi pengecekan kebenaran informasi, survei ini juga meneliti sumber yang digunakan pemilih digital native dalam melakukan verifikasi informasi. Data ini penting karena menunjukkan sejauh mana pemilih menggunakan sumber yang kredibel dalam memastikan keabsahan berita yang mereka terima. Dalam era digital, akses terhadap berbagai sumber informasi semakin luas, namun tidak semua

sumber memiliki tingkat kredibilitas yang sama (Raleigh et al., 2023). Oleh karena itu, memahami pola preferensi pemilih dalam memilih sumber verifikasi dapat memberikan wawasan tentang efektivitas upaya literasi politik dan digital dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks pemilu. Tabel 2 menunjukkan berbagai sumber yang digunakan pemilih digital native dalam mengecek kebenaran informasi terkait pemilu.

Tabel 2. Sumber Verifikasi Informasi oleh Pemilih Digital Native

| Sumber Verifikasi Informasi | Selalu (%) | Kadang-kadang (%) | Tidak Pernah (%) | Tidak Tahu (%) | Tidak Menjawab (%) |
|-----------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Google | 9,38 % | 31,41 % | 37,6 6% | 5,1 6% | 0,9 4% |
| Teman | 12,3 4% | 39,06 % | 28,1 3% | 4,0 6% | 0,6 3% |
| Grup WhatsApp | 3,75 % | 16,09 % | 57,8 1% | 4,8 4% | 1,5 6% |
| Portal Berita Resmi | 9,22 % | 18,28 % | 48,7 5% | 5,9 4% | 1,8 8% |
| Situs Resmi Pemerintah | 5,31 % | 13,59 % | 58,2 8% | 5,6 3% | 1,4 1% |
| Majalah/Surat Kabar | 2,97 % | 15,78 % | 58,2 8% | 5,4 7% | 1,2 5% |

Dari data di atas, terlihat bahwa hanya sebagian kecil responden yang secara aktif memanfaatkan mesin pencari seperti Google (9,38%) atau situs berita resmi (9,22%) dalam memverifikasi informasi yang mereka terima. Sebaliknya, mayoritas pemilih cenderung mengandalkan teman (12,34%) yang sering kali menjadi jalur utama penyebaran hoaks politik (Andriyendi et al., 2023). Ketergantungan pada jaringan sosial pribadi sebagai sumber verifikasi informasi dapat menjadi masalah, mengingat informasi yang disebar dalam lingkaran sosial sering kali bersifat bias dan kurang diverifikasi secara faktual (Majerczak & Strzelecki, 2022; Waruwu et al., 2021).

Rendahnya pemanfaatan sumber informasi yang kredibel juga terlihat dalam minimnya penggunaan situs resmi pemerintah (5,31%) dan media cetak seperti surat kabar atau majalah (2,97%). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi

informasi dari media tradisional ke media digital yang lebih interaktif namun memiliki risiko penyebaran misinformasi yang lebih tinggi (Caled & Silva, 2022). Penelitian sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa generasi digital native lebih cenderung mengakses berita melalui media sosial daripada melalui sumber berita tradisional, yang sering kali memiliki standar jurnalistik yang lebih ketat (Sixto-García et al., 2023).

Ketidakpercayaan terhadap media arus utama dan institusi pemerintah juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan sumber resmi dalam verifikasi informasi. Dalam konteks politik, kepercayaan publik terhadap media dan pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan konsumsi informasi pemilih (Hutchens et al., 2021). Jika pemilih merasa bahwa media atau pemerintah memiliki agenda tertentu, mereka mungkin lebih memilih untuk mengandalkan sumber informasi alternatif yang belum tentu memiliki standar verifikasi yang ketat (Kington et al., 2021).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pemilih digital native memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi, mereka belum secara optimal memanfaatkan sumber yang kredibel dalam memverifikasi kebenaran berita politik. Rendahnya kebiasaan melakukan verifikasi informasi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara akses informasi dan literasi digital yang dimiliki oleh pemilih muda. Padahal, dalam ekosistem informasi yang semakin kompleks dan penuh dengan disinformasi, kemampuan untuk memilah dan memverifikasi berita menjadi keterampilan yang sangat krusial dalam menjaga kualitas demokrasi (D'Andrea et al., 2025; Horowitz et al., 2022).

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi. Program literasi digital yang lebih komprehensif harus dirancang agar tidak hanya memberikan pemahaman dasar tentang bahaya hoaks, tetapi juga membekali pemilih dengan keterampilan praktis dalam menilai kredibilitas sumber informasi (Steinfeld, 2023). Kolaborasi antara pemerintah, media, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam memastikan bahwa informasi yang valid dan terpercaya dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pemerintah dapat berperan dalam membangun regulasi yang memperketat penyebaran berita palsu, sementara media harus lebih proaktif dalam menyediakan konten yang akurat dan mudah dipahami. Di sisi lain, lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan pola pikir kritis sejak dini agar generasi muda lebih terbiasa dalam memverifikasi informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya (Vargas & Saetermoe, 2024).

Implikasi terhadap Literasi Politik dan Demokrasi Digital

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting terhadap literasi politik di era demokrasi digital. Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi adanya kelemahan dalam kewaspadaan pemilih terhadap hoaks pemilu, tetapi juga menyoroti aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem edukasi politik dan literasi digital di Indonesia. *Pertama*, rendahnya kebiasaan memverifikasi informasi menunjukkan bahwa banyak pemilih digital native belum memiliki kesadaran yang cukup terhadap bahaya hoaks pemilu. Fenomena ini dapat berdampak signifikan pada kualitas partisipasi politik, mengingat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak akurat berpotensi mempengaruhi dinamika demokrasi secara lebih luas (Helbing et al., 2023). Pemilih yang kurang waspada terhadap misinformasi cenderung lebih mudah terpengaruh oleh narasi politik yang menyesatkan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada polarisasi opini publik dan penurunan kepercayaan terhadap proses demokrasi (Chambers, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun kesadaran kritis terhadap misinformasi politik, termasuk melalui pendidikan formal dan kampanye literasi digital yang efektif.

Kedua, minimnya penggunaan sumber kredibel dalam verifikasi informasi menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai pentingnya mencari informasi dari portal berita terpercaya dan situs resmi pemerintah. Studi sebelumnya menegaskan bahwa peningkatan literasi politik dapat membantu pemilih memilah informasi dengan lebih baik dan mencegah penyebaran hoaks (Bringula et al., 2022). Kurangnya kebiasaan memverifikasi informasi di sumber yang kredibel dapat dikaitkan dengan faktor kepercayaan publik terhadap institusi media dan pemerintah. Studi Kalogeropoulos et al., (2021) mencatat bahwa erosi kepercayaan terhadap media arus utama dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke sumber informasi alternatif yang sering kali kurang terverifikasi. Oleh karena itu, strategi edukasi yang menekankan pentingnya literasi media dan kemampuan berpikir kritis harus menjadi prioritas dalam upaya peningkatan literasi politik di kalangan pemilih muda.

Ketiga, peran media sosial dan grup percakapan seperti WhatsApp dalam penyebaran informasi politik menjadi tantangan tersendiri. Studi Sampat & Raj, (2022) menunjukkan bahwa berita palsu lebih cepat menyebar dibandingkan berita benar, terutama dalam platform yang berbasis interaksi sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Hoaks yang tersebar di media sosial sering kali dirancang untuk menarik emosi dan memanipulasi opini publik dengan narasi yang provokatif (Bilro et al., 2022; Dwivedi et al., 2023). Dalam konteks ini, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran kritis pemilih digital native terhadap informasi yang mereka konsumsi di media sosial.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah penguatan mekanisme fact-checking serta peningkatan literasi digital berbasis komunitas, di mana individu diajarkan untuk secara aktif memeriksa keabsahan berita sebelum menyebarkannya.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa dalam era demokrasi digital, literasi politik tidak bisa hanya berfokus pada pemahaman dasar tentang sistem politik dan hak suara, tetapi juga harus mencakup keterampilan dalam menavigasi ekosistem informasi yang semakin kompleks. Kemampuan memilah informasi yang kredibel, memahami bias media, serta mengenali strategi manipulasi informasi menjadi keterampilan esensial bagi pemilih digital native agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan disinformasi yang dapat mengganggu proses demokrasi (Dame Adjin-Tettey, 2022).

Dalam konteks ini, upaya literasi politik harus dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai aktor strategis. Pemerintah, akademisi, media, serta organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam merancang kebijakan dan program edukasi yang lebih adaptif dengan pola konsumsi informasi generasi digital native. Kurikulum pendidikan, misalnya, perlu memasukkan materi literasi digital yang membekali siswa dengan keterampilan kritis dalam menilai informasi politik di media sosial. Selain itu, platform media sosial juga harus berperan aktif dalam menyaring dan menandai informasi yang menyesatkan, sebagaimana diusulkan dalam berbagai penelitian tentang mitigasi hoaks (Sallami & Aïmeur, 2025).

Literasi politik dalam era digital juga harus mempertimbangkan dinamika interaksi sosial di ruang digital. Generasi digital native tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga produsen dan distributor informasi melalui media sosial dan platform daring lainnya. Oleh karena itu, edukasi politik tidak cukup hanya berfokus pada kesadaran individu, tetapi juga harus membangun tanggung jawab kolektif dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Kampanye edukasi berbasis komunitas, pelatihan jurnalistik warga, serta kolaborasi dengan influencer digital dapat menjadi strategi yang efektif dalam menanamkan budaya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, diharapkan generasi muda dapat menjadi pemilih yang lebih cerdas, kritis, dan tangguh dalam menghadapi disinformasi politik. Mereka tidak hanya mampu membedakan informasi yang valid dan menyesatkan tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi dengan membangun ruang diskusi yang sehat dan berbasis fakta. Tanpa peningkatan literasi politik yang memadai, generasi digital native berisiko menjadi sasaran utama manipulasi

informasi yang dapat merusak integritas pemilu dan stabilitas demokrasi secara keseluruhan (Danang Sa'adawisna & Bayu Karunia Putra, 2023)

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kewaspadaan pemilih digital native di Kota Pariaman terhadap hoaks pemilu masih relatif rendah. Mayoritas responden jarang atau bahkan tidak pernah melakukan verifikasi informasi, serta cenderung mengandalkan sumber yang kurang kredibel dalam mengecek kebenaran informasi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi politik digital masih perlu ditingkatkan agar generasi digital native dapat lebih kritis dalam memilah informasi yang mereka konsumsi.

Temuan ini menegaskan bahwa dalam era demokrasi digital, literasi politik tidak hanya mencakup pemahaman tentang sistem politik dan hak suara, tetapi juga harus melibatkan keterampilan dalam menavigasi ekosistem informasi yang semakin kompleks. Rendahnya kebiasaan memverifikasi informasi serta dominasi media sosial sebagai sumber utama informasi politik menuntut adanya strategi literasi digital yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta platform media sosial dalam merancang program edukasi yang mampu meningkatkan kemampuan pemilih dalam menilai kredibilitas informasi. Kurikulum pendidikan harus memasukkan materi tentang literasi digital dan politik, sementara kampanye publik dan pelatihan berbasis komunitas perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks dan disinformasi dalam politik.

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap pola konsumsi informasi generasi digital native, diharapkan mereka dapat menjadi pemilih yang lebih cerdas, kritis, dan tangguh dalam menghadapi disinformasi politik. Literasi politik yang kuat tidak hanya akan membantu mereka dalam membuat keputusan politik yang lebih rasional, tetapi juga akan berkontribusi pada terciptanya ruang diskusi demokratis yang lebih sehat dan berbasis fakta. Tanpa peningkatan literasi politik yang memadai, risiko manipulasi informasi dalam pemilu akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, N. H., Hassan, I., Fazil Ahmad, M., Hassan, N. A., & Ismail, M. M. (2021). Social Media, Youths and Political Participation in Malaysia: A Review of Literature. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3849948>
- Aïmeur, E., Amri, S., & Brassard, G. (2023). Fake news, disinformation and misinformation in social media: a review. *Social Network Analysis and Mining*, *13*(1), 30. <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01028-5>
- Andriyendi, D. O., S, N., & Dewi, S. F. (2023). Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada. *Journal of Education, Cultural and Politics*, *3*(1), 101–111. <https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.172>
- Au, C. H., Ho, K. K. W., & Chiu, D. K. W. (2022). The Role of Online Misinformation and Fake News in Ideological Polarization: Barriers, Catalysts, and Implications. *Information Systems Frontiers*, *24*(4), 1331–1354. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10133-9>
- Badrun, U. (2018). Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik di Era Demokrasi Digital (Tantangan Tahun Politik 2018-2019 dan Antisipasinya). *Jurnal Kajian Lemhannas R*, *33*(Maret), 21–36.
- Ben Youssef, A., Dahmani, M., & Ragni, L. (2022). ICT Use, Digital Skills and Students' Academic Performance: Exploring the Digital Divide. *Information*, *13*(3), 129. <https://doi.org/10.3390/info13030129>
- Benaissa Pedriza, S. (2021). Sources, Channels and Strategies of Disinformation in the 2020 US Election: Social Networks, Traditional Media and Political Candidates. *Journalism and Media*, *2*(4), 605–624. <https://doi.org/10.3390/journalmedia2040036>
- Bilro, R. G., Loureiro, S. M. C., & dos Santos, J. F. (2022). Masstige strategies on social media: The influence on sentiments and attitude toward the brand. *International Journal of Consumer Studies*, *46*(4), 1113–1126. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12747>
- Bouaamri, A., Otike, F., & Hajdu Barát, A. (2024). A review of the effectiveness of Collaborations and Partnerships in sustaining a Digital Literacy. *The Serials Librarian*, *85*(7–8), 232–246. <https://doi.org/10.1080/0361526X.2024.2391737>
- Bringula, R. P., Catacutan-Bangit, A. E., Garcia, M. B., Gonzales, J. P. S., & Valderama, A. M. C. (2022). “Who is gullible to political disinformation?”: predicting susceptibility of university students to fake news. *Journal of Information Technology & Politics*, *19*(2), 165–179. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1945988>

- Bulya, B., & Izzati, S. (2024). Indonesia's Digital Literacy as a Challenge for Democracy in the Digital Age. *The Journal of Society and Media*, 8(2), 640–661. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p640-661>
- Caffrey, C., Lee, H., Withorn, T., Galoozis, E., Clarke, M., Philo, T., Eslami, J., Ospina, D., Haas, A., Kohn, K. P., Macomber, K., Clawson, H., & Vermeer, W. (2023). Library instruction and information literacy 2022. *Reference Services Review*, 51(3/4), 319–396. <https://doi.org/10.1108/RSR-08-2023-0061>
- Caled, D., & Silva, M. J. (2022). Digital media and misinformation: An outlook on multidisciplinary strategies against manipulation. *Journal of Computational Social Science*, 5(1), 123–159. <https://doi.org/10.1007/s42001-021-00118-8>
- Chambers, S. (2021). Truth, Deliberative Democracy, and the Virtues of Accuracy: Is Fake News Destroying the Public Sphere? *Political Studies*, 69(1), 147–163. <https://doi.org/10.1177/0032321719890811>
- D'Andrea, A., Fusacchia, G., & D'Ulizia, A. (2025). Policy Review: Countering Disinformation in the Digital Age - Policies and Initiatives to Safeguard Democracy in Europe. *Information Polity*. <https://doi.org/10.1177/15701255251318900>
- Dame Adjin-Tettey, T. (2022). Combating fake news, disinformation, and misinformation: Experimental evidence for media literacy education. *Cogent Arts & Humanities*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2037229>
- Danang Sa'adawisna, & Bayu Karunia Putra. (2023). POLITICAL EDUCATION TO INCREASE BEGINNER VOTER PARTICIPATION IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS. *Awang Long Law Review*, 5(2), 419–431. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.716>
- Dwivedi, Y. K., Ismagilova, E., Rana, N. P., & Raman, R. (2023). Social Media Adoption, Usage And Impact In Business-To-Business (B2B) Context: A State-Of-The-Art Literature Review. *Information Systems Frontiers*, 25(3), 971–993. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10106-y>
- Erickson, J. (2024). Rethinking the filter bubble? Developing a research agenda for the protective filter bubble. *Big Data & Society*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/20539517241231276>
- Fernandes, R., Ananda, A., & Montessori, M. (2022). Implementation of Intracurricular Political Education into Sociology Education for Young Voters. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 8916–8927.
- Foyet, M., & Child, B. (2024). COVID-19, social media, algorithms and the rise of indigenous movements in Southern Africa: perspectives from activists, audiences and policymakers. *Frontiers in Sociology*, 9.

<https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1433998>

- Fyfe, I. (2007). Hidden in the Curriculum: Political Literacy and Education for Citizenship. *Australia Melbourne Journal of Politics*, 32, 110–134.
- Guess, A. M., Lockett, D., Lyons, B., Montgomery, J. M., Nyhan, B., & Reifler, J. (2020). “Fake news” may have limited effects beyond increasing beliefs in false claims.
- Guess, A. M., & Munger, K. (2023). Digital literacy and online political behavior. *Political Science Research and Methods*, 11(1), 110–128. <https://doi.org/10.1017/psrm.2022.17>
- Helbing, D., Mahajan, S., Fricker, R. H., Musso, A., Hausladen, C. I., Carissimo, C., Carpentras, D., Stockinger, E., Argota Sanchez-Vaquerizo, J., Yang, J. C., Ballandies, M. C., Korecki, M., Dubey, R. K., & Pournaras, E. (2023). Democracy by Design: Perspectives for Digitally Assisted, Participatory Upgrades of Society. *Journal of Computational Science*, 71, 102061. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2023.102061>
- Horowitz, M., Cushion, S., Dragomir, M., Gutiérrez Manjón, S., & Pantti, M. (2022). A Framework for Assessing the Role of Public Service Media Organizations in Countering Disinformation. *Digital Journalism*, 10(5), 843–865. <https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1987948>
- Hutchens, M. J., Hmielowski, J. D., Beam, M. A., & Romanova, E. (2021). Trust Over Use: Examining the Roles of Media Use and Media Trust on Misperceptions in the 2016 US Presidential Election. *Mass Communication and Society*, 24(5), 701–724. <https://doi.org/10.1080/15205436.2021.1904262>
- Imawan, R. (2023). Digital Democracy: The Evolution of Indonesia Electoral Politics. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*, 3(1), 65–78.
- Interian, R., G. Marzo, R., Mendoza, I., & Ribeiro, C. C. (2023). Network polarization, filter bubbles, and echo chambers: an annotated review of measures and reduction methods. *International Transactions in Operational Research*, 30(6), 3122–3158. <https://doi.org/10.1111/itor.13224>
- Iosifidis, P., & Nicoli, N. (2020). *Digital democracy, social media and disinformation*. Routledge.
- Iskandar, F., & Faozi, A. A. (2025). Legal Review of Hoaxes on Social Media in the Post-Truth Era. *Law and Judicial Review*, 1(1/2), 47–61.
- Isnaini, I., Nasyiriyah, T. N., Aulia Istighfari, N., & Rohmah, S. R. (2025). The Role of Digital Literacy in Social Media. *MIMESIS*, 6(1), 58–74. <https://doi.org/10.12928/mms.v6i1.12242>

- Kalogeropoulos, A., Rori, L., & Dimitrakopoulou, D. (2021). ‘Social Media Help Me Distinguish between Truth and Lies’: News Consumption in the Polarised and Low-trust Media Landscape of Greece. *South European Society and Politics*, 26(1), 109–132. <https://doi.org/10.1080/13608746.2021.1980941>
- Karolčík, Š., Steiner, J., & Čipková, E. (2025). Politics and political literacy in education from the perspective of the public. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2457560>
- Khalyubi, W., & Perdana, A. (2021). Electoral Manipulation Informationally on Hoax Production in 2019 Presidential and Vice Presidential Election in Indonesia. *Journal of Government and Political Issues*, 1(2). <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i2.17>
- Kim, E., & Yang, S. (2016). Internet literacy and digital natives’ civic engagement: Internet skill literacy or Internet information literacy? *Journal of Youth Studies*, 19(4), 438–456. <https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1083961>
- Kington, R. S., Arnesen, S., Chou, W.-Y. S., Curry, S. J., Lazer, D., & Villarruel, A. M. (2021). Identifying Credible Sources of Health Information in Social Media: Principles and Attributes. *NAM Perspectives*, 2021. <https://doi.org/10.31478/202107a>
- Koskelainen, T., Kalmi, P., Scornavacca, E., & Vartiainen, T. (2023). Financial literacy in the digital age—A research agenda. *Journal of Consumer Affairs*, 57(1), 507–528. <https://doi.org/10.1111/joca.12510>
- Kozyreva, A., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2020). Citizens Versus the Internet: Confronting Digital Challenges With Cognitive Tools. *Psychological Science in the Public Interest*, 21(3), 103–156. <https://doi.org/10.1177/1529100620946707>
- Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social Media’s Influence on Political Participation: Insights from a Systematic Review and Meta-Analysis in Indonesian Psychology. *Jurnal Psikologi*, 51(3), 236. <https://doi.org/10.22146/jpsi.101469>
- Lewandowsky, S., & van der Linden, S. (2021). Countering Misinformation and Fake News Through Inoculation and Prebunking. *European Review of Social Psychology*, 32(2), 348–384. <https://doi.org/10.1080/10463283.2021.1876983>
- Lim, M. (2023). “ Everything Everywhere All At Once”: Social Media, Marketing/Algorithmic Culture, and Activism in Southeast Asia. *Georgetown Journal of International Affairs*, 24(2), 181–190.
- Majerczak, P., & Strzelecki, A. (2022). Trust, Media Credibility, Social Ties, and the Intention to Share towards Information Verification in an Age of Fake News. *Behavioral Sciences*, 12(2), 51. <https://doi.org/10.3390/bs12020051>

- Mascitti, M. (2024). The Metaverse impact on the politics means. *Computer Law & Security Review*, 55, 106037. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106037>
- Newton, K. (2021). Widespread Reach, not much Influence: Online News and Mass Political Attitudes and Behaviour in the <scp>UK</scp>. *The Political Quarterly*, 92(4), 716–726. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13052>
- Nwagwu, E. J., Uwaechia, O. G., Udegbumam, K. C., & Nnamani, R. (2022). Vote Buying During 2015 And 2019 General Elections: Manifestation and Implications on Democratic Development in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1995237>
- Oh, S. S., Kim, K.-A., Kim, M., Oh, J., Chu, S. H., & Choi, J. (2021). Measurement of Digital Literacy Among Older Adults: Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research*, 23(2), e26145. <https://doi.org/10.2196/26145>
- Pantazi, M., Hale, S., & Klein, O. (2021). Social and Cognitive Aspects of the Vulnerability to Political Misinformation. *Political Psychology*, 42(S1), 267–304. <https://doi.org/10.1111/pops.12797>
- Pareek, S., & Goncalves, J. (2024). Peer-supplied credibility labels as an online misinformation intervention. *International Journal of Human-Computer Studies*, 188, 103276. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2024.103276>
- Raleigh, C., Kishi, R., & Linke, A. (2023). Political instability patterns are obscured by conflict dataset scope conditions, sources, and coding choices. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01559-4>
- Rubio, R., & Monteiro, V. de A. (2023). Preserving trust in democracy: The Brazilian Superior Electoral Court's quest to tackle disinformation in elections. *South African Journal of International Affairs*, 30(3), 497–520. <https://doi.org/10.1080/10220461.2023.2274860>
- Sallami, D., & Aïmeur, E. (2025). Exploring beyond detection: a review on fake news prevention and mitigation techniques. *Journal of Computational Social Science*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.1007/s42001-024-00351-x>
- Sampat, B., & Raj, S. (2022). Fake or real news? Understanding the gratifications and personality traits of individuals sharing fake news on social media platforms. *Aslib Journal of Information Management*, 74(5), 840–876. <https://doi.org/10.1108/AJIM-08-2021-0232>
- Sixto-García, J., Silva-Rodríguez, A., Rodríguez-Vázquez, A. I., & López-García, X. (2023). Redefining journalism narratives, distribution strategies, and user involvement based on innovation in digital native media. *Journalism*, 24(6),

- 1322–1341. <https://doi.org/10.1177/14648849211062766>
- Steinfeld, N. (2023). How Do Users Examine Online Messages to Determine If They Are Credible? An Eye-Tracking Study of Digital Literacy, Visual Attention to Metadata, and Success in Misinformation Identification. *Social Media + Society*, 9(3). <https://doi.org/10.1177/20563051231196871>
- Surjatmodjo, D., Unde, A. A., Cangara, H., & Sonni, A. F. (2024). Information Pandemic: A Critical Review of Disinformation Spread on Social Media and Its Implications for State Resilience. *Social Sciences*, 13(8), 418. <https://doi.org/10.3390/socsci13080418>
- Swart, J. (2023). Tactics of news literacy: How young people access, evaluate, and engage with news on social media. *New Media & Society*, 25(3), 505–521. <https://doi.org/10.1177/14614448211011447>
- Tandoc Jr, E. C., Lim, D., & Ling, R. (2020). Diffusion of disinformation: How social media users respond to fake news and why. *Journalism*, 21(3), 381–398.
- Tapsell, R. (2021). Social media and elections in Southeast Asia: The emergence of subversive, underground campaigning. *Asian Studies Review*, 45(1), 117–134.
- Vargas, J. H., & Saetermoe, C. L. (2024). The antiracist educator's journey and the psychology of critical consciousness development: A new roadmap. *Educational Psychologist*, 59(1), 20–41. <https://doi.org/10.1080/00461520.2023.2243329>
- Waruwu, B. K., Tandoc, E. C., Duffy, A., Kim, N., & Ling, R. (2021). Telling lies together? Sharing news as a form of social authentication. *New Media & Society*, 23(9), 2516–2533. <https://doi.org/10.1177/1461444820931017>
- Weiss, M., & Zoorob, M. (2021). Political frames of public health crises: Discussing the opioid epidemic in the US Congress. *Social Science & Medicine*, 281, 114087. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114087>
- Wong, L.-W., Tan, G. W.-H., Hew, J.-J., Ooi, K.-B., & Leong, L.-Y. (2022). Mobile social media marketing: a new marketing channel among digital natives in higher education? *Journal of Marketing for Higher Education*, 32(1), 113–137. <https://doi.org/10.1080/08841241.2020.1834486>
- Yang, J., Tlili, A., Huang, R., Zhuang, R., & Bhagat, K. K. (2021). Development and Validation of a Digital Learning Competence Scale: A Comprehensive Review. *Sustainability*, 13(10), 5593. <https://doi.org/10.3390/su13105593>